

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SONDAKAN

Indyra Bernice Azhary¹

¹Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta. (Corresponding email: indyrabernicee@student.uns.ac.id)

Abstract

Poverty is a complex issue that requires sustainable handling strategies. The government has implemented the Conditional Cash Transfer program known as the Family Hope Program (PKH) to alleviate poverty by improving the quality of life of poor communities through better access to education, health, and social welfare services. This study aims to assess the effectiveness of PKH in reducing poverty in Sondakan Subdistrict, using four main indicators: target accuracy, program objectives, program socialization, and program monitoring. This research employs a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Robert K. Merton's Functionalism structural theory is used to analyze the interrelation of elements within the social system, highlighting the function of each component in supporting the sustainability of PKH.

The results show that the program is effective in terms of socialization, but less effective in target accuracy, goal achievement, and monitoring. Identified obstacles include dependency among beneficiaries, as well as administrative and system-related issues. The evaluation of these obstacles suggests the need for beneficiary education, administrative and system improvements, and enhanced support from program facilitators. The government also strives to improve program effectiveness through not only material support but also moral encouragement, graduation programs, and skills training to promote economic independence.

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program (PKH), Poverty Alleviation, Program Evaluation.

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemerintah merancang Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sondakan dengan mengacu pada empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton digunakan untuk menganalisis peran masing-masing elemen dalam mendukung keberlangsungan sistem sosial dalam konteks pelaksanaan PKH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sosialisasi program berjalan secara efektif, sedangkan ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, dan pemantauan dinilai kurang efektif. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah ketergantungan penerima terhadap bantuan, serta masalah sistem dan administrasi. Evaluasi terhadap hambatan tersebut meliputi edukasi penerima, perbaikan sistem dan administrasi, serta peningkatan peran pendamping. Pemerintah juga melakukan upaya peningkatan efektivitas program melalui dukungan moral, pelatihan keterampilan, dan program graduasi guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Evaluasi Program.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang saat ini statusnya masih terus dilakukan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan-kemiskinan yang mencolok masih kerap dijumpai di negara negara berkembang maupun negara maju meskipun telah dilakukan banyak perbaikan-perbaikan yang masif dan signifikan (Todaro & Smith, 2006). Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2023). Program ini mencakup tiga komponen utama: kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), pendidikan (anak usia sekolah), dan kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas berat). Di Kota Surakarta, termasuk Kelurahan Sondakan, PKH telah berjalan selama beberapa tahun. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan, mengingat jumlah penerima bantuan meningkat setiap tahun meskipun jumlah penduduk miskin

tidak menunjukkan penurunan signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketergantungan bantuan dan kurangnya kemandirian ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya membahas efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti mengenai efektivitas PKH khususnya di Kelurahan Sondakan, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tersendiri. Selain itu pada penelitian sebelumnya cenderung membahas efektivitas PKH secara umum, namun penelitian ini lebih fokus pada indikator spesifik, seperti ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi, dan pemantauan program yang dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH.

Program Keluarga Harapan saat ini seharusnya dianggap sebagai sebuah program yang berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Surakarta. Namun pada kondisi senyatanya, Program Keluarga Harapan secara keseluruhan masih belum memberikan dampak yang efektif dalam kehidupan Keluarga Penerima Manfaat dari indikator yang ditentukan, yakni mengenai efektivitas ketepatan sasaran, tujuan program dan pemantauan program yang dirasa kurang efektif dan maksimal dikarenakan ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaannya atau dikatakan belum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Masih banyak ditemukan berbagai masalah mengenai program ini, khususnya terdapat banyak masyarakat yang ketergantungan akan program bantuan dan tidak memiliki motivasi atau kemandirian ekonomi pada PKH di Kelurahan Sondakan.

Fokus penelitian ini adalah mendapatkan gambaran atau deskripsi riil di lapangan mengenai “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sondakan” dengan mengukur sejauh mana efektivitas program keluarga harapan dalam indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, serta mengidentifikasi kendala yang ditemui di lapangan selama program ini berjalan yang menghasilkan evaluasi mengenai program ini, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah di masa mendatang. Selain itu, peneliti juga ingin mendalami mengenai usaha usaha yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sondakan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengajukan

penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sondakan”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas Program

Menurut Makmur (2008: 34), Efektivitas program adalah nilai dari kesesuaian program yang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dan dibandingkan dengan pencapaian hasil program. Efektivitas program juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau rencana sehingga menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi penerima manfaat (Dunn, 2003). Menurut Budiani (2019:24) menjelaskan, faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 kriteria, sebagai berikut:

a. *Ketepatan Sasaran Program*

Ketepatan sasaran program mengacu pada sejauh mana program dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program yang efektif harus dapat menjangkau penerima manfaat yang tepat sehingga tujuan utama dari program dapat tercapai secara optimal.

b. *Sosialisasi Program*

Sosialisasi program merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, serta persyaratan program.

c. *Tujuan Program*

Tujuan program harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Tujuan yang spesifik dan realistis akan membantu dalam perencanaan dan evaluasi program secara efektif

d. *Pemantauan Program*

Pemantauan program merupakan proses evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2023). Menurut Widjajanti (2019) menjelaskan bahwa PKH mengadopsi pendekatan *Conditional Cash Transfer*, yaitu skema bantuan sosial yang tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari keluarga penerima manfaat.

3. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Suharto (2019:58) pengentasan kemiskinan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut Todaro dan Smith (2006:142), pengentasan kemiskinan tidak hanya mencakup bantuan finansial, tetapi juga melibatkan strategi peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Berikut beberapa penelitian sejenis mengenai PKH:

- 1) Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020) yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan” membahas mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan dan faktor kendala yang ditemui di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga membahas mengenai kategori efektif, cukup efektif, dan kurang efektif.
- 2) Penelitian oleh Domry, dkk. (2019) yang berjudul “Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Penelitian ini membahas mengenai analisis bagaimana

efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Penelitian ini juga membahas tentang Program PKH yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Sedangkan hambatannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH dan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pada program PKH

- 3) Penelitian oleh Pratiwi, D. (2020) yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)” Penelitian ini membahas mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan pemerintah di setiap era pemerintahan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program PKH di Desa Kedaton I. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai tujuan PKH untuk kesejahteraan keluarga dan ketepatan sasaran dari program PKH, serta membahas mengenai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, agar memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Penelitian ini juga membahas terkait penemuan kendala mulai dari masyarakat, pemanfaatan dana, ketepatan sasaran, dan rendahnya kesadaran orangtua mengenai pendidikan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian berupa deskripsi dan analisis sebuah peristiwa, fenomena, dan masalah yang terjadi dan berisi tulisan, ucapan serta perilaku yang diamati (Bogdan & Biklen, 1992; 21). Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam keadaan objek bersifat alamiah dan data yang diperoleh berupa data kualitatif dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat memperoleh data secara alamiah dari narasumber terkait dan penelitian ini menggunakan Paradigma Fungsionalis dan jenis pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dan data sekunder melalui dokumen atau arsip yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yang melibatkan Dinas Sosial Kota Surakarta, kepala Kelurahan Sondakan, pendamping sosial PKH Kelurahan Sondakan dan Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Sondakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sondakan

Dalam hasil penelitian ini akan dibahas mengenai efektivitas PKH dengan indikator yang digunakan oleh peneliti, yakni mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program yang mencakup dalam komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial, dan komponen kesehatan.

a. Ketepatan Sasaran Program

1) *Komponen Pendidikan*

Bantuan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan. Komponen ini mencakup bantuan untuk anak usia sekolah pada tiga jenjang pendidikan, yaitu: SD sebesar Rp. 225.000/ Tahap, SMP sebesar Rp.375.000/ Tahap SMA sebesar Rp. 500.000/ Tahap.

“Untuk komponennya anak sekolah ya saya alokasikan untuk kebutuhan sekolah, bayar sekolah, bisa untuk keperluan yang masuknya ke anak seperti buku, seragam. Adanya bantuan itu ya sangat terbantu dengan adanya program ini kan saya bisa menyekolahkan anak saya tanpa khawatir biayanya bagaimana. (K, 14 Januari 2025).

Keefektifan program ini terlihat dari bagaimana bantuan tersebut digunakan secara langsung untuk kebutuhan sekolah, seperti pembelian buku, seragam, alat tulis, dan pembayaran biaya pendidikan lainnya.

1). *Komponen Kesehatan*

Komponen kesehatan ini secara khusus menargetkan ibu hamil dan anak usia dini yang berusia 0-6 Tahun, dengan maksimal dua anak per keluarga dengan bantuan sebesar Rp. 750.000 per tahap. Komponen ini dikatakan efektif apabila dipergunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dari ibu hamil dan anak usia dini agar mewujudkan generasi *zero stunting*.

“.. PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mengharuskan penerima untuk memenuhi sejumlah kewajiban. Misalnya, ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan

kehamilan secara rutin di puskesmas serta mendapatkan layanan kesehatan seperti imunisasi dan edukasi gizi. Balita juga harus mendapatkan imunisasi lengkap dan pemantauan pertumbuhan Di posyandu, selain itu bantuan saya pergunakan sesuai dengan kebutuhannya spt cek hamil, gizinya, imunisasi anak, popok, kebutuhan harian saya alokasikan kesana” (S, 10 Februari 2025)

Selain pemenuhan gizi, adanya kewajiban bagi KPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di puskesmas, memastikan imunisasi balita, serta mengikuti program edukasi gizi. Hal ini menunjukkan PKH tidak hanya membantu dari segi ekonomi tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan anak.

2). *Komponen Kesejahteraan Sosial*

Komponen ini dapat dikatakan efektif apabila dipergunakan sesuai dengan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas dengan besaran Rp.600.000 per tahap.

“...untuk kebutuhan gizi, berobat, dan kebutuhan lainnya yang pasti membantu saya apalagi diusia saya sekarang yang sudah 50 ke atas ya kan pendapatan sudah tidak seperti dulu” (M, 14 Januari 2025).

“Kalau untuk anak saya yang disabilitas, itu untuk susu kan susunya sesuai aturan dokter, Biaya transportasi, terapi ke rumah sakit, obat-obatan .. jadi tiap bulan harus control, untuk terapi juga seminggu bisa 3x karena kalau tidak terapi bisa terjadi kemunduran pada anak saya. (I, 11 Februari 2025).

Dalam komponen ini dapat dibuktikan bahwa penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas berat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yakni :

1. Domisili KPM yang tidak sesuai sehingga sulit untuk dimonitoring terkait pencairan bantuan.
2. Ketergantungan program. Hal ini menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
3. Kondisi ekonomi yang tidak merata dalam satu keluarga.

4. Sistem yang kurang responsif dalam pembaruan data.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan program PKH di Kelurahan Sondakan telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan komponennya, namun terdapat beberapa kendala terkait ketepatan sasaran program. Banyaknya hambatan yang terjadi ini menjadikan program ini dikatakan tidak efektif karena belum optimal dalam ketepatan sasarnya (Yolanita & Yuniningsih, 2020;130-135).

b. Keefektifan Sosialisasi Program.

Sosialisasi yang dilakukan dengan baik menghasilkan penerima manfaat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta mampu memanfaatkan bantuan secara tepat guna. Salah satu indikator keefektifan sosialisasi PKH adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat.

“Kegiatan pertemuannya itu mengenai misalkan untuk bulan ini pencairannya tanggal berapa, kadang ada stimulasi-stimulasi kegiatan seperti penerangan mengenai DBD, lalu penyuluhan sosialisasi PKH, namun juga bisa yang lain. Lalu pertemuan tersebut bersifat wajib jika tidak datang harus ada perwakilan yang menggantikannya” (M, 14 Januari 2025).

. Dalam sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan PKH. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan penyuluhan mengenai P2K2 edukasi yang ini menjadi tombak kunci program ini. Hal ini menjadikan PKH unggul dibandingkan dengan program bantuan. Secara keseluruhan, sosialisasi PKH di Kelurahan Sondakan telah dilakukan secara sistematis dan efektif.

c. Keefektifan Tujuan Program

Tujuan Program dikatakan efektif apabila sesuai dengan sesuai dengan tujuannya guna mengentaskan kemiskinan jangka panjang dan ketergantungan program bantuan. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian

bantuan tunai yang disertai dengan kewajiban tertentu bagi penerima manfaat (KPM) dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

“Untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat miskin dan rentan hidupnya lebih tertata dan terstruktur, anak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, untuk ibu hamil bisa

membantu untuk proses kehamilannya, menurunkan resiko anak stunting dan untuk lansia kan juga gizinya jadi terpenuhi, masyarakat yang disabilitas juga bisa terbantu ekonominya yaa kurang lebih agar masyarakat diharapkan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera kedepannya dan mandiri secara ekonominya serta menekan angka kemiskinan yang terjadi di tiap tiap daerah” (A, 24 Desember 2025).

Selain itu PKH juga memiliki tujuan dalam mengubah perilaku KPM agar tidak selamanya bergantung dalam pada program bantuan, KPM harus bisa memiliki kemandirian ekonominya sendiri yang dibantu dengan pemberian edukasi dan motivasi serta diberikan pelatihan untuk pengembangan kreatifitas. Namun selama keberjalanan program justru terjadi hambatan dalam tujuan program yakni dengan adanya masyarakat yang ketergantungan dan enggan di graduasi karena kondisi ekonominya belum mandiri. Maka, tujuan program dinyatakan tidak efektif karena belum berjalan sesuai dengan tujuannya.

d. Efektivitas Pemantauan Program.

Dengan adanya pemantauan ini dapat diketahui apakah program itu berjalan sesuai dengan semestinya, Pada pencairan data dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau alurnya itu awal 1) Harus terdaftar pada GAKIN di prioritas p1,p2 selanjutnya harus sudah masuk data DTKS” (A, 23 Januari 2025).

“atau juga pengajuan dari RT/RW juga kita terima kemudian kita juga mengajukan sesuai dengan indikator yang diberikan dinas. Pembaruan data tersebut untuk nantinya bisa menjadi data di tahun kedepan untuk ajuan kedepan istilahnya antri untuk diberikan data dari Dinas Sosial. (A, 24 Desember 2025).

“Melalui aplikasi E-SIK, yakni data kemiskinan lokal yang sesuai kondisi eksistain masyarakat kota surakarta, dengan

melalui petugas home-visit kelurahan untuk mengukur kelayakan langsung ke masyarakat yang mengajukan diri atau yang dilaporkan oleh RT/RW setempat mengenai kategori miskin atau tidak, maka dilakukan homevisit yang akan muncul nilai atau skor yang menentukan dia itu layak di prioritas berapa, kalau miskin itu masuk di P1,P2 dan mungkin yang bukan prioritas itu masuk ke P3-P6, Kita diuntungkan dengan adanya E-SIK itu misalkan nanti sewaktu-waktu ada usulan baru PKH itu dia itu bisa diusulkan lewat DTKS dulu, lalu itu nanti dari pihak KEMENSOS RI yang akan mengantriakan (T, 20 Januari 2025).

Selain itu Aspek yang dimonitoring selanjutnya berupa proses pencairan dana. Pendamping sosial PKH bertugas untuk memonitoring bagaimana bantuan tersebut apakah telah sampai ke masyarakat hingga penggunaan bantuan apakah sesuai dengan tujuannya.

“Yang bersangkutan akan menerima undangan dari pihak bayar PT.POS atau BNI yang difasilitasi kartu KKS atau kartu ATM yang digunakan untuk penyaluran dana langsung ke KPM..tanpa ada pemotongan apapun,.. jadi sudah dipastikan untuk penyaluran dana sudah tepat sasaran” (A, 23 Januari 2025).

Dari penjelasan tersebut, maka dikatakan pencairan dana telah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaan monitoring ini ditemukan pula kendala yang terjadi selama proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yakni ditemukan adanya hambatan terkait sistem dan data yang tidak terbarukan serta kurangnya responsivitas dalam pengelolaan data dapat menghambat efektivitas pemantauan program seperti pada ketidaksesuaian data dari penerima manfaat. (Sajidin, 2024). Kegagalan sistem ini sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya yang menjadikan pemantauan program ini tidak efektif.

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sondakan belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama yang belum berjalan dengan baik, yaitu ketepatan sasaran, tujuan program dan pemantauan program.

2. Evaluasi bagi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sondakan

Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan sehingga diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini muncul dikarenakan ada ketidakselarasan antara program dan masyarakat, sehingga timbulah sebuah permasalahan ataupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

“Menurut saya dengan kondisi yang dirasa masih cukup sulit, ya memang masih membutuhkan bantuan ini jangka panjang pasti sangat membantu mbak karena kan usaha jahit juga tidak terua menerus rame, kalau ada orderan aja alhamdulillah kalau tidak ya kami sepenuhnya pakai uang bantuan” (A, 14 Januari 2025).

“Ada beberapa KPM saya yang sudah saya tidak layakkan, namun pada tahapan selanjutnya tetap dapat bantuan, setelah saya check ternyata sistem pusat kurang responsif dalam pembaruan data di sistemnya, jadi yang saya non-aktifkan seperti graduasi, meninggal dunia, dan sebagainya ya dapat terus sampai beberapa kali sampai akhirnya berhenti” (A, 23 Januari 2025).

“rata-rata KPM di Kelurahan Sondakan itu domisilinya tidak di Solo, Jadi karena dia tidak berdomisili di Solo, jadi mungkin dia belum mengambil bantuannya lalu tidak ada laporan ke kami, jadi masuk ke penelitian bansos kenapa bantuan tersebut tidak diambil, disitu saya posisinya susah menghubungi karena beliau tidak di Solo tetapi administrasinya masih di Solo saya kesulitan memastikan apakah bantuan tersebut sudah dicairkan atau belum jadi saya juga susah memonitoring (A, 23 Januari 2025).

“...selain itu ada juga yang memberikan aduan terkait terputusnya bantuan KPM yang disebabkan karena anggota keluarganya ada yang bekerja sebagai ASN padahal mereka sudah terpisah rumah, namun secara administratif masih dalam 1 KK, itu juga menjadi masalah bagi masyarakat. (A, 23 Januari 2025).

“Kalau hambatan ya itu sering menjadi aduan masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran kenapa masih di verifikasi masih muncul tapi kita tidak dilayakkan, ..” (T, 20 Januari 2025).

Dari adanya hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut terjadi hambatan terkait ketergantungan program, hambatan terkait sistem yang kurang responsif, hambatan terkait domisili KPM yang tidak sesuai, hambatan berupa aduan mengenai terputusnya bantuan dan hambatan terkait ketidaktepatan sasaran

Adanya berbagai hambatan selama keberjalanan PKH, dibutuhkan evaluasi yang membangun baik dari pihak pemerintah serta masyarakatnya, evaluasi ini dipergunakan sebagai saran yang dapat dipergunakan agar PKH di

Kelurahan Sondakan berjalan semakin baik sesuai dengan tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat sondakan. Adapun evaluasi khusus sebagai berikut:

“Terus kita berikan support dan motivasi bahwa bantuan itu bukan penghasilan yang bisa diandalkan terus menerus, tetap prioritas atau usaha dari masyarakatlah yang seharusnya menjadi penunjang utama ekonomi mereka. (A, 23 Januari 2025).

Evaluasi bagi ketergantungan program bantuan. Dengan pemberian edukasi, dan KPM juga harus memiliki kemandirian ekonomi, dengan menambah penghasilan seperti memiliki usaha-usaha kecil agar roda perekonomiannya bergerak, dan KPM yang graduasi dan memiliki usaha nantinya juga akan diberikan bantuan alat untuk mengembangkannya agar KPM terlepas dari bantuan jangka panjang.

“lebih ke perbaikan sistem kami, karena kami merasa kalau sudah ada yang graduasi tapi tahap selanjutnya masih cair terus, kan akan jadi bahan pertanyaan KPM yang lain ya, karena kalau kami dilapangan kami selalu memberikan pemutakhiran data terbaru semisal meninggal, atau graduasi ya kami laporkan biar bantuan itu bisa diserap yang lain kan pada akhirnya kan bisa jadi temuan yang bisa pengaruh juga keefektifan tepat sarannya kan kalau seperti itu sistemnya jadi kurang ya saya rasa” (A, 23 Januari 2025).

Evaluasi bagi hambatan sistem yang kurang responsif. Sistem yang kurang responsif ini menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, diharapkan dengan adanya perbaikan pada sistem akan memperbaiki pemutakhiran data yang telah diinput agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat miskin yang lebih layak

“Pada sistem kami namanya E-SIK untuk saya cek status dari KPM tersebut apa, apakah masih available menerima bantuan, apa ternyata sudah dinonaktifkan daerah, atau mungkin terdeteksi anggotanya ... jadi langsung terputus semua. Proses selanjutnya saya berikan terus edukasi terkait dengan data-data tersebut.... baiknya untuk dipisahkan KK dengan orangtua yang bersangkutan, karena akan mempengaruhi data di sistem, gapapa untuk alamatnya masih di satu rumah kan bisa beberapa KK, tetapi yang jelas harus pisah KK jadi orangtua tetap aman” (A, 23 Januari 2025).

Evaluasi terkait hambatan terkait aduan masyarakat mengenai bantuan yang terputus sistem. Dengan melakukan pengecekan terkait status

bantuan, dapat diketahui faktor penyebab putusnya bantuan tersebut seperti dinon-aktifkan atau terdapat komponen yang sudah dinilai tidak layak menerima bantuan, maka diberikan evaluasi berupa lebih digencarkan lagi berupa edukasi program, dan diberikan himbauan agar tidak terjadi kedepannya.

“saya menghimbau alangkah baiknya jika sudah berpindah domisili, ya di pindah administrasinya sesuai dengan domisilinya, jadi bantuannya kemungkinan bisa dibawa ke alamat yang bersangkutan selama alamat tersebut masih masuk kedalam program PKH. Jika ternyata saat berpindah domisili dan di domisili batunya dia dinyatakan mampu akan tetap dihimbau untuk graduasi” (A, 23 Januari 2025).

Evaluasi terkait domisili KPM yang tidak sesuai. Diberikan evaluasi berupa himbauan terkait pemindahan domisili secara langsung, agar KPM tetap mendapatkan hak nya meskipun sudah berpindah domisili.

“...kita terus memberikan pantauan dan edukasi mengenai program ini sesuai dengan arahan pusat, selain itu kita selalu lakukan homevisit kalau ada aduan, yang dilakukan dengan beda petugas jadi (2x homevisit) gunanya apa jadi nanti kalau yang pertama di homevisit dia ini masuk ke prioritasnya P3-P4 dia tidak terima, jadi dicoba di homevisit oleh petugas lain hasilnya tetap sama berarti kan ada banyak faktor mbak seperti penjelasannya tidak jujur...”(T, 20 Januari 2025).

Evaluasi terkait ketepatan sasaran. Evaluasi yang diberikan berupa ada baiknya dilakukan peninjauan ulang terkait kelayakannya dengan melakukan homevisit secara berkala akan menghasilkan hasil yang konkret berada pada prioritas berapa, apabila sudah tidak layak akan dilakukan ketidelayakan melalui hitam diatas putih, sehingga tidak lagi mengalami ketidaktepatan sasaran.

3. Usaha-Usaha Pemerintah Untuk Meningkatkan Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sondakan.

Adanya evaluasi tersebut, dapat dilihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita juga selain pemberian sosialisasi dan edukasi p2.k2 tadi kita juga memberikan cenderamata seperti peralatan masak untuk bisa menggraduasi PKH. Graduasi PKH itu ada 2, yang pertama graduasi reguler yang disebabkan komponen yang bersangkutan sudah habis jadi otomatis diberhentikan, yang kedua ada Graduasi mandiri dimana dia sadar dengan sendirinya untuk mengundurkan diri dari bantuannya yang biasanya udah punya usaha itu biasanya mereka diedukasi karena sudah dirasa mampu setelah itu memberikan pelatihan seperti pelatihan pembuatan roti, potong rambut, mua dan sebagainya yang dibutuhkan oleh KPM dan diberikan alat penunjang agar masyarakat bisa mandiri dalam ekonominya” (T, 20 Januari 2025).

“Setelah adanya graduasi Pena Berdikari itu lanjutan dari graduasi bagi yang menginginkan, dengan adanya graduasi PENA akan diberikan bantuan sosial 1x sebesar Rp.2.400.000 cuman dalam bentuk modal usaha seperti peralatan yang linear bagi yang memiliki usaha, untuk yang karyawan tidak bisa. Selain itu juga ada yang dari pusat namanya Pena Reguler jumlah bantuannya sebesar Rp.5000.000 tetapi bantuannya itu yang memilih dari pusat karena dia sudah telalu lama di PKH jadi di graduasikan (Senior lebih dari 5 tahun) cuman tidak semua. Selain itu dinas juga memberikan pelatihan-pelatihan karena dinas bekerjasama dengan dinas-dinas lain untuk diberi pelatihan gratis untuk mengasah skill KPM, biar bisa meningkatkan usahanya” (A, 23 Januari 2025).

“..Pemerintah memiliki peranan yang cukup krusial dalam program ini, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan keefetifan program yang dipantau tiap tahunnya dengan adanya paparan kinerja atau laporan akhir tahun dari progress yang ada di lapangan agar disurvei dan ditinjau kembali mengenai kelayakan hingga aduan dari masyarakat agar dapat meraih indikator keberhasilan program dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat” (Tutut, 20 Januari 2025).

Selain adanya dukungan dari aspek materil, pemerintah memiliki peranan yang lebih menonjol pada aspek moril, terutama dalam memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingan kepada masyarakat. Pemerintah juga memberikan modal usaha yang disebut dengan PENA. Selain itu mendapatkan pula cenderamata berupa peralatan masak. Selanjutnya diadakan evaluasi rutin akhir tahun Dinas Sosial Kota Surakarta serta pendamping sosial.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sondakan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PKH berkaitan dengan teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton, karena PKH sendiri dirancang sebagai program bantuan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut Merton (1968), teori ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu, di mana PKH bertindak sebagai elemen yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang dialami oleh KPM. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran yang mendukung keberlanjutan sistem sosial secara keseluruhan. Robert K Merton menjelaskan adanya konsep konsep yang berkaitan tersebut yaitu Fungsi Nyata (Manifest Function), Fungsi Laten (Laten Function), Disfungsi (Disfunctions), serta adanya konsep Perangkat (Role-set).

a. Ketepatan Sasaran Program

Dalam hal ini, PKH secara eksplisit dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin pada komponen pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan merata (Rohman, 2009) Sesuai dengan Fungsi Nyata (Merton, 1968), bantuan ini diharapkan mengurangi beban ekonomi dan mencegah anak putus sekolah (Rohaeni & Saryono, 2018). Di Kelurahan Sondakan, bantuan dialokasikan sesuai kebutuhan pendidikan seperti SPP, buku, seragam, dan transportasi (Nurwan & Hasan, 2020). Bantuan ini mendukung program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga miskin (Suparno, 2018). Selain komponen Pendidikan, terdapat komponen Kesehatan. Sesuai Fungsi Nyata (Merton, 1968), komponen ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan ibu hamil dan anak balita. Program ini mewajibkan pemeriksaan kehamilan, imunisasi balita, serta kehadiran rutin di posyandu. Di Kelurahan Sondakan, KPM menggunakan bantuan untuk kebutuhan gizi dan kesehatan seperti susu, vitamin, dan cek kesehatan rutin. Program ini tidak hanya membantu ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memperhatikan kesehatan (Putri,

2023). Selain itu terdapat komponen kesejahteraan sosial, Sesuai Fungsi Nyata (Merton, 1968), PKH memberikan bantuan kepada lansia dan penyandang disabilitas berat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan (Hartanto, 2019). Bantuan digunakan untuk makanan, pengobatan, alat bantu, dan terapi rutin. Di Kelurahan Sondakan, bantuan ini efektif membantu mengurangi ketergantungan lansia dan meringankan beban ekonomi keluarga dengan penyandang disabilitas (Kumala, 2024). Program ini juga meningkatkan kualitas hidup dan akses layanan kesehatan seperti homecare dan home visit, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial jangka panjang.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ketepatan sasaran pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sondakan pada sudah sesuai dengan tujuannya. Pada pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan ketepatan sasaran. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan bantuan tidak sepenuhnya tepat guna dan tepat sasaran, sehingga efektivitas program menjadi kurang optimal (Pratama, 2022). Menurut Merton (1968), Disfungsi manifest berarti munculnya konsekuensi disfungsi yang didapatkan dari fungsi manifest seperti ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan fungsi tujuannya. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang ditemui dalam ketepatan sasaran PKH di Kelurahan Sondakan:

1. Tidak lagi berdomisili di Kelurahan Sondakan.

Ketika ada KPM yang pindah domisili tetapi datanya tidak segera diperbarui, maka bantuan yang mereka terima akan terhambat, Hal ini menyebabkan pendamping sosial susah untuk memonitoring bantuan tersebut apabila tidak memperbarui data pemindahan.

2. Ketergantungan program bantuan

Hambatan lain dalam ketepatan sasaran PKH adalah adanya KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan karena merasa ekonominya selalu terjaga dengan mendapatkan program bantuan secara terus menerus dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan graduasi mandiri.

3. Kondisi ekonomi yang tidak merata dalam satu Keluarga

Masalah ketepatan sasaran PKH semakin kompleks ketika dalam satu keluarga terdapat anggota yang sudah mapan secara ekonomi, sementara orang tua atau anggota keluarga lainnya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.

4. Ketidaksesuaian Data dalam Sistem Verifikasi Bantuan

Kendala lain yang sering muncul adalah data yang digunakan dalam verifikasi bantuan sering kali tidak dapat diperbarui dengan cepat, sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam status penerima manfaat.

b. Keefektifan Sosialisasi Program

Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan meningkatkan transparansi informasi. Sosialisasi yang diadakan rutin setiap bulan membantu realisasi tujuan PKH secara optimal (Sutjiatmi & Umaroh, 2019). Menurut Zannah (2003), sosialisasi efektif menjadi faktor kunci keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan KPM, memperjelas hak, kewajiban, jadwal pencairan, serta administrasi program. Dalam perspektif teori Robert K. Merton, fungsi laten dari sosialisasi seperti peningkatan partisipasi sosial dan rasa percaya diri KPM muncul meski tidak direncanakan secara langsung (Merton, 1968). Efektivitas sosialisasi PKH di Kelurahan Sondakan terlihat dari tingginya pemahaman KPM terhadap tujuan dan manfaat program, kepatuhan terhadap kewajiban (seperti kehadiran anak di sekolah dan cek kesehatan), serta peningkatan kemandirian KPM.

Melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), KPM tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga edukasi di bidang pendidikan, keuangan, pengasuhan, perawatan lansia, dan ekonomi mandiri. P2K2 membantu memperkuat kapasitas keluarga penerima manfaat agar lebih produktif dan mandiri. Namun, beberapa kegiatan sosialisasi seperti pengisian formulir dan absensi rutin yang dirasa

repetitif dapat dikategorikan sebagai non-fungsi (Merton, 1968), karena tidak berdampak langsung terhadap efektivitas program. Meskipun demikian, hal ini tidak menghambat keberhasilan sosialisasi secara umum. Sosialisasi PKH di Kelurahan Sondakan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi guna mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dalam jangka panjang.

c. Keefektifan Tujuan Program

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin serta memutus rantai kemiskinan (Kemensos, 2016). Dalam teori Merton (1968), ini merupakan fungsi nyata (manifest function) karena tujuan program dirancang secara eksplisit. PKH diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 dengan skema bantuan bersyarat bagi KPM. Di Kelurahan Sondakan, penggunaan bantuan sesuai kebutuhan komponen menunjukkan tujuan program berjalan. Namun, efektivitasnya belum optimal. Sebagian KPM justru bergantung pada bantuan, sehingga kurang termotivasi untuk mandiri (Sugiarto, 2023:114). Fenomena ketergantungan ini merupakan disfungsi manifest, yakni dampak negatif yang sudah diperkirakan namun tetap terjadi (Merton, 1968). Faktor seperti kurangnya edukasi kemandirian, minimnya pelatihan, dan persepsi keliru tentang bantuan menyebabkan resistensi terhadap proses graduasi.

d. Keefektifan Pemantauan Program

Pemantauan program PKH merupakan fungsi nyata menurut Merton (1968), dilakukan melalui kunjungan rumah, layanan pengaduan, pertemuan rutin, serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (Rahmadila, 2023). Pendamping sosial memonitor mulai dari pendataan berbasis DTKS dan E-SIK (Ulina, 2022), hingga pencairan dana melalui PT POS dan HIMBARA. Namun, pemantauan di Kelurahan Sondakan masih menghadapi hambatan seperti ketidakakuratan data domisili KPM (Sajidin, 2024) dan keterlambatan pemutakhiran data SIKS. Akibatnya, ada KPM

yang seharusnya sudah graduasi tetap menerima bantuan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

2. Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sondakan

Dalam pelaksanaannya, PKH di Kelurahan Sondakan menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program, sesuai dengan konsep disfungsi manifest Robert K. Merton, yaitu konsekuensi negatif yang sudah diperkirakan namun tetap terjadi (Merton, 1968). Hambatan tersebut antara lain:

a. Ketergantungan Jangka Panjang

Banyak KPM bergantung pada bantuan PKH meskipun sudah memiliki usaha, namun belum mandiri secara ekonomi (Prichatin, 2019). Hal ini memerlukan edukasi intensif tentang pentingnya graduasi dan diberikan pelatihan keterampilan agar memiliki skill untuk perekonomiannya, serta monitoring berkala melalui homevisit.

b. Sistem Kurang Responsif

Permasalahan pada sistem E-SIK, seperti lambatnya pembaruan data, menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Diperlukan sistem real-time yang terintegrasi untuk mempercepat pemutakhiran data.

c. Ketidaksesuaian Domisili KPM

Banyak KPM yang berpindah domisili tanpa memperbarui data, menyulitkan pemantauan. Evaluasi menekankan pentingnya pelaporan perubahan alamat melalui kerja sama dengan kelurahan.

d. Terputusnya Bantuan Secara Tiba-Tiba

Perubahan status sosial anggota keluarga dalam KK menyebabkan bantuan terhenti. Solusi yang ditawarkan adalah edukasi kepada KPM agar memisahkan administrasi KK agar bantuan tidak terganggu.

e. Ketidaktepatan Sasaran

Ketidakadilan distribusi bantuan memicu kecemburuan sosial. Diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme seleksi PKH dan prosedur pendaftaran bagi yang merasa layak, melalui sistem GAKIN dan DTKS.

3. Usaha Pemerintah Meningkatkan Efektivitas PKH di Kelurahan Sondakan

Pemerintah terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan. Mengacu pada Todaro dan Smith (2006), upaya ini tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Dalam perspektif Role Set Merton (1968), pelaksanaan PKH melibatkan peran pemerintah, Dinas Sosial, KPM, dan pendamping sosial. Pemerintah rutin memantau kinerja tahunan, mengevaluasi kendala, serta merancang strategi baru untuk optimalisasi program (Erwandi, 2020). Selain itu, dukungan moril berupa motivasi, bimbingan, serta edukasi terus diberikan kepada masyarakat (Helmi, 2023).

Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti pembuatan roti, tata rias, dan potong rambut. Peserta yang lulus mendapatkan sertifikat untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Proses graduasi terdiri atas graduasi reguler (komponen program habis) dan graduasi mandiri (KPM memilih keluar karena mandiri). Setelah graduasi, KPM mendapat dukungan lanjutan melalui Program PENA, berupa bantuan modal usaha, baik melalui skema PENA Berdikari (Rp2.400.000) maupun PENA Reguler (Rp5.000.000). Meski jumlah KPM yang lulus masih terbatas, hasilnya cukup positif, dengan semakin banyak masyarakat yang mandiri dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga rutin melakukan evaluasi kinerja akhir tahun untuk mengidentifikasi hambatan, jumlah graduasi, serta seluruh hal yang terjadi terkait keseluruhan dalam lapangan sebagai bahan acuan evaluasi agar program ini berjalan lebih baik lagi kedepannya. Komitmen pemerintah dalam mendukung PKH berkelanjutan memperlihatkan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mengoptimalkan program ini.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sondakan:

Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sondakan dinyatakan tidak efektif. Hal ini dilihat dari 1 indikator berhasil yakni sosialisasi program dan 3 indikator yang mengalami hambatan yakni pada indikator ketepatan sasaran, tujuan program dan pemantauan program yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran PKH di Kelurahan Sondakan secara umum sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, pada pelaksanaannya efektivitas program masih menghadapi hambatan, seperti penerima manfaat yang tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut, ketergantungan terhadap bantuan, kondisi ekonomi yang tidak merata dalam satu keluarga, serta ketidaksesuaian data dalam sistem verifikasi. Hambatan-hambatan ini menjadikan ketepatan sasaran program menjadi kurang optimal dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dinyatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

b. Indikator sosialisasi PKH menunjukkan bahwa:

Sosialisasi program dapat dikatakan efektif karena berhasil meningkatkan pemahaman KPM mengenai tujuan, mekanisme, manfaat, serta kewajiban dalam program ini. Selain sosialisasi terkait program, dilakukan pula sosialisasi edukasi P2K2, sosialisasi tidak hanya memastikan transparansi informasi, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi KPM melalui sosialisasi P2K2 yang membahas terkait ekonomi dan kesehatan serta kesejahteraan bagi keluarga. Meskipun terdapat beberapa kegiatan repetitif yang kurang berdampak signifikan, secara keseluruhan sosialisasi PKH berkontribusi positif dalam mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM menuju kesejahteraan yang lebih mandiri.

c. Indikator tujuan program menunjukkan bahwa:

Tujuan program bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan. Namun, hal ini belum berjalan sesuai dengan tujuannya, meskipun bantuan yang digunakan dikatakan cukup membantu ekonomi KPM, namun justru banyak KPM yang merasa ketergantungan dengan adanya program ini, beberapa KPM enggan untuk melepaskan bantuannya bahkan setelah bantuan tersebut sudah menysar keluarga mereka selama bertahun-tahun sehingga dapat dinyatakan tujuan program belum tercapai.

d. Indikator pemantauan program menunjukkan bahwa:

Pemantauan Program dilakukan secara sistematis melalui kunjungan rumah, pertemuan rutin, dan kelompok pengaduan. Pemantauan ini berfokus pada alur pendataan, proses pencairan dana, ketidaklayakan serta hambatan yang terjadi di lapangan, pendamping sosial PKH juga dimonitoring secara ketat oleh Dinas Sosial Kota Surakarta untuk memastikan bahwa tugas pemantauan mereka dilaksanakan dengan baik, akurat, dan transparan. Namun, pada pelaksanaannya pemantauan program masih menghadapi kendala, seperti ketidakakuratan data domisili KPM, kegagalan system dalam memperbarui data secara cepat dan tepat, serta kecenderungan ketergantungan pada bantuan sehingga kendala tersebut menyebabkan pemantauan program dinyatakan tidak efektif.

2. Evaluasi bagi program keluarga harapan di Kelurahan Sondakan menunjukkan bahwa:

Dengan adanya berbagai hambatan, seperti ketergantungan jangka panjang penerima, Maka, evaluasi yang diterapkan meliputi peningkatan pada edukasi, motivasi dan pendampingan intensif kepada KPM. Pada ketidaksesuaian domisili, maka ditingkatkan mengenai himbuan kepada KPM selalu memberikan laporan terkait pemindahan domisili secara langsung agar kedepannya tidak mengalami masalah administrasi saat proses penerimaan bantuan. Pada pemutusan bantuan mendadak, maka

diperlukan pengecekan ulang pada E-SIK serta dilakuakn peningkatan pada sosialisasi mengenai himbauan dan edukasi lebih lanjut terkait teknis keseluruhan PKH agar tidak terjadi kendala sistem dan kesalahan KPM karena sudah tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya pada sistem yang kurang responsif diperlukan peningkatan dan perbaikan sistem pemutakhiran data agar lebih responsif dan update terkait data-data yang diperbarui oleh pendamping sosial agar ter-update data secara real-time. Maka dengan adanya evaluasi yang mendalam dan berbasis data, pemerintah dapat memberikan perbaikan kebijakan yang lebih strategis.

3. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program keluarga harapan di Kelurahan Sondakan menunjukkan bahwa:

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas (PKH). Usahnya berupa evaluasi berkelanjutan dilakukan melalui laporan akhir tahun tahunan dan laporan kinerja harian guna memastikan program berjalan optimal. Selain bantuan finansial, pemerintah juga memberikan dukungan moral, edukasi, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi KPM. Selain itu pemerintah juga memberikan dukungan lanjutan beruoa program graduasi, baik reguler maupun mandiri, didukung dengan pelatihan dan bantuan modal alat usaha melalui program PENA untuk menunjang usaha KPM. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi mampu berdaya secara ekonomi, menciptakan usaha, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan lingkungan sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Bogdan, Robert C. and Taylors K.B. (1992). *Qualitative Researctch for Education an Introduc to Theory and Metdods* Bosten: Ally and Bacon Inc.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Hartanto, A. A. E. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
- Helmi, M. (2023). Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur).
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Kumala, S. A. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PKH DALAM KOMPONEN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KELOMPOK LANJUT USIA DAN DISABILITAS BERAT). *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 40-55.
- Merton, R.K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Nurwani, T. W., & Hasani, H. (2020). Keberhasilan PKHDitinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat. *Sosio Konsepsia*, 10 No. 1, 1-13.
- Pratama, R. A., Broto, M. F., & Persada, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Prichatin, A. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Putri, B. R. (2023). Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Akses Kesehatan Dan Pendidikkan Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Niara*, 15(3), 468-475.
- Rahmadila (2023). Pkh, k. H. Peran pendamping sosial kota lhokseumawe dalam graduasi keluarga penerima manfaat (kpm) program.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pinta (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. Vol. 2 (1).

- Rohman, A. (2009). Memahami pendidikan & ilmu pendidikan. ed.1., cet.1. Yogyakarta : LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela".
- Sajidin, A. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Sutjiatmi, S., & Umaroh, F. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal* Vol 2 No 2, 1-8.
- Suharto, E. (2019). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, E. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Suparno, S. (2018). Analisis Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Prestasi Belajar Anak Di Kecamatan Sepauk. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 177-185.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006) *Economic Development*, gh edition, England: Pearson Education Limited.
- Ulina, S., Ginting, B., & Putri, M. (2022). Implementasi Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Suka Makmur). *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 1(2), 94-105.
- Widjajanti, R. (2019). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Conditional Cash Transfer (CCT)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yolanita, R., & Yuniningsih, T. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Zannah, R. N. (2023). *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.